

Judul : DRP Periode 2019-2024 : Setumpuk PR Menanti Wakil Rakyat
Tanggal : Rabu, 02 Oktober 2019
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

Setumpuk PR Menanti Wakil Rakyat

Bisnis, JAKARTA — Setumpuk pekerjaan rumah menanti untuk diselesaikan oleh 575 politisi yang dilantik dan disumpah sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 pada Selasa (1/10).

Muhamad Wildan & Jeffry P. Prabu
redaksi@bisnis.com

Sidang paripurna pelantikan anggota DPR-DPD-MPR dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selain itu, turut hadir sejumlah tokoh nasional Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Wapres keenam Try Sutrisno, dan Wapres kesembilan Hamzah Haz.

Hadir pula Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan tokoh muda Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Pimpinan DPR RI periode 2019—2024 adalah Ketua DPR Puan Maharani (Fraksi PDI Perjuangan), serta para Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra), Rahmat Gobel (Fraksi Partai Nasdem), dan Abdul Muhaimin Iskandar (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa).

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani tercatat sebagai wanita

► Anggota DPR baru diharapkan dapat memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat mengenai revisi dan rancangan UU yang sedang dibahas.

pertama yang memimpin parlemen di Indonesia setelah PDIP sebagai pemenang pemilu menyetujui penunjukannya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap anggota baru DPR benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajibannya pada periode 2019—2024.

"Harapannya DPR ini berfungsi betul. Fungsi DPR ini kan tiga hal, legislasi, *budgeting*, dan pengawasan. Tiga hal itu yang harus dilaksanakan dengan baik," kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (1/10).

Wapres mencatat rapor merah DPR periode 2014—2019 salah satunya terkait dengan fungsi legislasi yang terlambat, termasuk di antaranya pembahasan sejumlah revisi dan rancangan undang-undang (UU) yang terburu-buru di akhir periode.

"Kalau kita lihat, 5 tahun ini [fungsi] legislasi telat. Tapi ini sulitnya DPR, mau cepat salah, mau lambat juga salah. Nah, ini kan memperlambat juga. Jadi serba salah juga DPR sebenarnya," kata Wapres.

JK menilai keterlambatan DPR sebelumnya terkait dengan proses legislasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU yang dirancang. Akibatnya, banyak pihak tidak memeriksa secara terperinci mengenai revisi atau rancangan UU tersebut.

Oleh karena itu, anggota DPR baru diharapkan dapat memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat mengenai revisi dan rancangan UU yang sedang dibahas.

"Banyak kita kadang-kadang tidak memeriksa, jadi apa yang kita tidak suka ya langsung saja tidak suka. Maka DPR harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai isu UU itu. Juga pemerintahan, karena UU itu hasil DPR dan pemerintahan."

Pakar Komunikasi Politik



Wakil Presiden Jusuf Kalla

—“—
"Fungsi DPR ini kan tiga hal, legislasi, *budgeting*, dan pengawasan. Tiga hal itu yang harus dilaksanakan dengan baik."
—”

Selain itu, DPR kadang memiliki citra buruk di mata masyarakat sehingga perlu diperbaiki. "Citra DPR belum membaik, masih buruk, itu PR juga," katanya saat dihubungi *Bisnis*, Selasa (1/10).

Tak jauh berbeda, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate menilai anggota baru DPR perlu memperbaiki kinerja dalam rangka memperbaiki persepsi masyarakat terhadap lembaga legislatif tersebut.

"Manajemen di DPR RI ini perlu diperbaiki baik terkait dengan proses legislasi, pengawasan, maupun kualitas belanja negara melalui hak *budget* DPR," ujarnya, Selasa (1/10).

Sementara itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira yang kembali menjadi anggota

menyoroti soal kualitas pembuatan UU. Andreas mengatakan kinerja anggota DPR yang baru harus lebih baik dan diperbaiki dari sebelumnya.

"Pertama di dalam perencanaan [legislasi]. Rencana harus realistis. Jadi yang benar dibutuhkan masyarakat, tidak dibuat perencanaan dengan target yang tinggi, tapi tidak tercapai. Bukan soal jumlahnya, tapi kualitasnya," kata Andreas, Selasa (1/10).

Untuk meningkatkan kualitas UU, Andreas menjelaskan para anggota harus bekerja yang benar. Di sisi lain publik harus memahami isi substansi yang dikritisi.

"Yang sekarang kan yang kita lihat kan yang tidak mereka pahami berkembang hanya karena visi paham substansinya," jelas /

Sekretaris Jenderal Partai Pembangunan Ansul Sani ya terpilih lagi menjadi anggota DPR RI.

"Di masyarakat seolah-olah harus diatur undang-undang tidak diatur undang-undang dan tidak ada hukum. Padahal bisa diatur dengan peraturan pemerintah, dengan aturan lain," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra Prabowo mengatakan yang pertama pekerjaan rumah legislatif adalah komunikasi dengan pemerintah merampungkan UU. Ini karena pembahasan sampai dengan sahan harus mendapat kesepakatan kedua belah pihak.

"50:50 posisinya. Usulan naik atau turun melalui DPR, usulan masuk atau tidak masuk melalui DPR, kompilasi jadi satu undang-undang jelasnya.

Edhy mencontohkan saat ini pimpinan di Komisi IV. Rancangan UU (RUU) Karantina yang bisa kelar dalam setahun mungkin 4 tahun.

Masalahnya adalah antartahap yang belum sepakat adanya badan karantina yang dalam RUU. Padahal, di Komisi IV sendiri sudah tidak ada masalah.

"Kita tidak saling menyalahkan. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Lebih dari itu, kita harus ada pemerintah yang terlibat sendiri untuk apa paksakan undang-undang yang ujungnya tidak akan dilaksanakan pemerintah."

(Rayful John A. Oktaveri/Antara)